

**ANALISIS PENGARUH DEMOKRASI, INDEKS GINI DAN UPAH MINIMUM  
PROVINSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai syarat untuk memenuhi mata kuliah Tugas Akhir1 pada Jurusan  
Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*



**OLEH**

**ADIB  
14060035 / 2014**

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

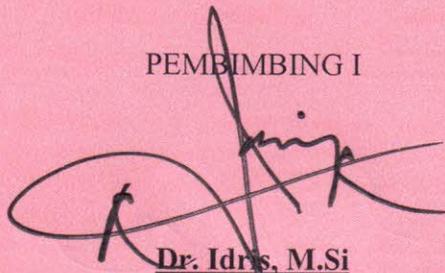
**ANALISIS PENGARUH DEMOKRASI, INDEKS GINI DAN UPAH  
MINIMUM PROVINSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI  
INDONESIA**

NAMA : ADIB  
BP/NIM : 2014/14060035  
KEAHLIAN : EKONOMI PUBLIK  
JURUSAN : ILMU EKONOMI  
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Agustus 2018

Telah Disetujui Oleh :

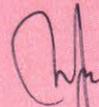
PEMBIMBING I



**Dr. Idris, M.Si**

NIP: 19610703 198503 1 005

PEMBIMBING II

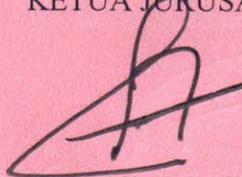


**Mike Triani, SE. MM.**

NIP: 19840129 200912 2 002

Diketahui Oleh :

KETUA JURUSAN



**Drs. Ali Anis, MS**

NIP: 19591129 198602 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

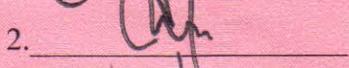
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**ANALISIS PENGARUH DEMOKRASI, INDEKS GINI DAN UPAH  
MINIMUM PROVINSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI  
INDONESIA**

Nama : ADIB  
NIM/TM : 14060035/2014  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Ekonomi Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2018

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	TandaTangan
1	Ketua	: Dr. Idris, M.Si	1. 
2	Anggota	: Mike Triani, SE, MM	2. 
3	Anggota	: Ariusni, SE, M.Si	3. 
4	Anggota	: Drs. Ali Anis, MS	4. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Adib  
NIM / Tahun Masuk : 14060035/ 2014  
Tempat / Tanggal Lahir : Batusangkar/ 25 Oktober 1995  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Kcahlian : Ekonomi Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jl. Bhakti No. 20 C Parupuk Tabing, Padang  
No. HP / Telepon : 082385919842  
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Demokrasi, Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis / skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis / skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis / skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis / skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, ..... 2018

Yan  
  
METERAN  
TEMPEL  
14060035/2018  
5000  
ENAM RIBU RUPIAH

Adib  
NIM. 14060035/2014

## ABSTRAK

**ADIB**  
**2014/14060035**

**Analisis Pengaruh Demokrasi , Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, dengan dosen pembimbing (1) Bapak Dr. Idris, M.Si, dan dosen pembimbing (2) Ibu Mike Triani, SE, MM**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh hubungan Demokrasi, Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Data yang digunakan adalah data panel dari 33 Provinsi di Indonesia selama periode tahun 2010-2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan asosiatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Random Effect Model (REM)*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Indeks Demokrasi Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, (2) Indeks gini berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, (3) Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia., (4) Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Gini, Upah Minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Disarankan kepada pemerintah hendaknya lebih memperhatikan kondisi Demokrasi, Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi, karena dengan begitu dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pertumbuhan Ekonomi ( PDRB ADHK), Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Gini, Upah Minimum Provinsi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul *“Analisis Pengaruh Demokrasi, Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi Terhadap pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”* dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. Idris, M.Si selaku pembimbing (I) dan Ibu Mike Triani, SE, MM selaku pembimbing (II) yang telah sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Teristimewa kepada Orang Tua dan Keluarga tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta doa, dukungan, semangat dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Ali Anis, M.S selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Melty Roza Adry, SE, M.E selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ariusni SE,M.Si dosen penguji (1) dan Bapak Drs. Ali Anis,MS Ariusni SE,M.Si selaku dosen penguji (2) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu tentang soft skill, organisasi, dan bantuan miral, material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bapak ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Keluarga Besar GIBEI FE UNP yang telah memberikan pengalaman berharga kepada saya selama kurang lebih 4 tahun, dan terkhusus kepada pembina kami ibu Erly Mulyani SE.MM.,Akt yang selalu memberikan nasehat dan bimbingan setiap saat kepada kami.

9. Kepada Keluarga Besar Formi Madani yang telah memberikan pencerahan terhadap pandangan hidup saya kedepannya. Terkhusus kepada Bg Zikri yang tanpa bosan selalu mengingatkan untuk beribadah.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Zikir, Damrul, Rifki, Fauzy, Teguh, Edo, Isra, Yogi dan Ronal
11. Kepada Etek-etek Squad Sara, Ifa, Melni, Curen, Via, Putri.
12. Rekan-rekan sepejuangan Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2014 tanpa terkecuali.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kita semua.

Padang, Juli 2018

Penulis,

ADIB

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS. 13</b>	
A. KAJIAN TEORI.....	13
1. Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2. Dampak Demokrasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	17
3. ketimpangan pendapatan.....	24
4. Upah terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	29
B. Penelitian Terdahulu.....	30
C. Kerangka Konseptual .....	34
D. Hipotesis .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
C. Jenis data dan Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	39
E. Variabel Penelitian.....	39
F. Definisi Operasional .....	40
G. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	51
1. Keadaan Geografis Indonesia .....	51
2. Keadaan Penduduk Indonesia .....	52
B. Deskripsi Variabel Penelitian .....	55
1. Deskriptif kondisi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.....	55
2. Deskriptif kondisi Indeks Demokrasi Indonesia.....	58
3. Deskriptif kondisi Indeks Gini di Indonesia .....	60
4. Deskriptif kondisi Upah Minimum Provinsi di Indonesia.....	63
C. Analisis Induktif .....	65
1. Uji Pemilihan Model Data Panel .....	67
2. Uji Regresi Panel .....	69
3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	71

4. Pengujian Hipotesis .....	72
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	74
1. Pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia .....	74
2. Pengaruh Indeks Gini Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia .....	77
3. Pengaruh Upah Minimum Provinsi di Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.....	79
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>82</b>
A. Simpulan.....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1.1. Peringkat Demokrasi Indonesia Tahun 2007-2015 Versi The Economist.....	5
1.2 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut Provinsi Tahun 2009-2016.....	7
4.1 Perkembangan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia selama Periode 2000-2015 .....	52
4.2 Perkembangan PDRB ADHK 2010 Indonesia Selama Periode 2012-2016.....	55
4.3 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Selama Periode 2012-2016.....	57
4.4 Perkembangan Indeks Gini di Indonesia Selama Periode 2012-2016 .....	60
4.5 Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Indonesia Selama Periode 2012- 2016.....	62
4.6 Hasil Uji Chow .....	66
4.7 Hasil Uji Hausman .....	67
4.5 Hasil Estimasi Random Effect Model.....	68

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

2.1 Kurva Lorenz .....	24
2.2 Koefisien Gini .....	25
2.3 Kurva Kuznets “U-Terbalik” .....	27

## **DAFTAR GRAFIK**

### **Grafik**

1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2008-2016

## **BAB I**

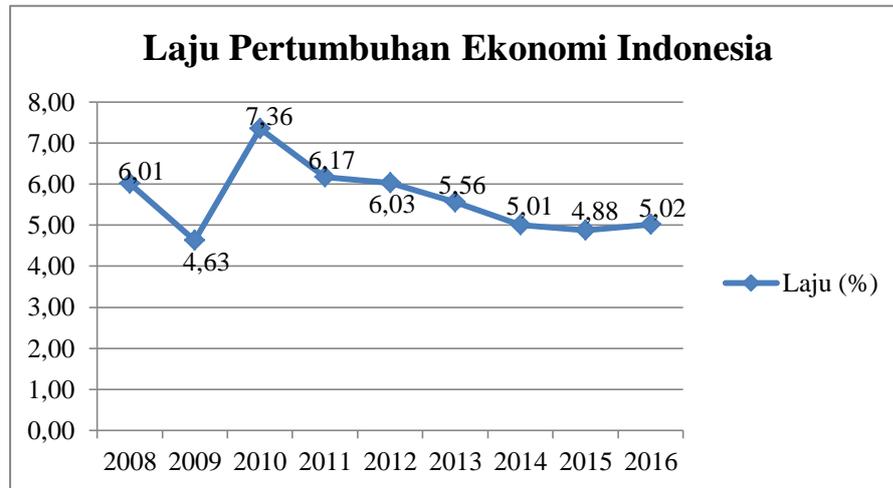
### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu perekonomian telah mengalami proses peningkatan dan mencapai taraf kemakmuran yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari produktivitas negara tersebut. Produktivitas negara merupakan jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh seluruh penduduk negara itu secara agregat.

Seperti kita telah ketahui berhasil atau tidaknya program-program pembangunan di negara-negara dunia sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur penilaian pertumbuhan ekonomi nasional sudah terlanjur diyakini serta diterapkan secara luas, untuk itu kita diharapkan tidak tertinggal dan mau tidak mau juga harus berusaha mempelajari hakekat dan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari angka PDB nasional ataupun PDRB untuk daerah terutama untuk menganalisa hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Setiap tahun, pemerintah Indonesia selalu menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran angka tertentu sebagai salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi.

**Grafik 1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2008-2016**



*Sumber : Bank Indonesia, 2017*

Dari grafik diatas dapat kita lihat laju Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2008-2016 bersifat fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2008-2016 berkisar 4% sampai 7%. Namun 4 tahun terakhir perekonomian Indonesia mulai mengalami perlambatan hal ini dapat kita lihat dimana laju Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa mencapai 6%. Bahkan pada tahun 2015 Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mencapai 5%.

Penurunan laju pertumbuhan ekonomi paling tinggi terjadi pada tahun 2009 hal itu terjadi karena diawali terjadinya krisis ekonomi di Amerika Serikat, hal ini menyebabkan terjadi krisis ekonomi global karena Amerika Serikat adalah kekuatan ekonomi terbesar di dunia sehingga menyebar ke seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, dan membuat turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009. Sedangkan penurunan ekonomi pada tahun 2014 sampai 2016 disebabkan terjadinya perlambatan

ekonomi negara Tiongkok (RRT), dimana Indonesia memiliki hubungan mitra dagang dengan negara tersebut mendapatkan efek negatif berupa turunnya laju pertumbuhan ekonomi.

Dalam sebuah negara dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi memiliki karakteristik institusional yang baik, yang diukur dengan beberapa variabel, seperti; efisiensi peradilan, kebebasan ekonomi, tingkat korupsi yang rendah, pemerintahan yang efektif serta perlindungan terhadap properti. Lebih lanjut lagi, kebebasan ekonomi menggambarkan sebuah institusi yang baik. Oleh karena itu, kualitas sebuah institusi diyakini akan semakin memberikan efek positif pada pertumbuhan ekonomi.

Salah satu bentuk institusi adalah institusi politik. Mankiw (2000) dan Blanchard (2006) mengungkapkan bahwa perekonomian sebuah negara tidak akan terlepas dari peranan faktor politik. Kondisi politik yang aman dan stabil akan berpengaruh positif terhadap perekonomian. Bahwa sebuah institusi akan berperan penting dalam menjaga kestabilan politik sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lebih jauh lagi, berbagai indikator muncul untuk mengukur bagaimana faktor politik mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Indikator-indikator tersebut antara lain; *property rights*, *pressure of redistribution*, dan *predatory dictator* (Drazen, 2000).

Institusi politik yang lebih demokratis di Indonesia muncul pasca reformasi 1998. Setelah selama 32 tahun Indonesia dibawah kekuasaan rezim Orde baru mengalami kemunduran politik. Baru setelah terjadi reformasi

tahun 1998, menjadikan kembali hidupnya politik di Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyaknya partai politik yang mengikuti Pemilu pasca reformasi. Pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik, Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai, Pemilu di tahun 2009 diikuti oleh 38 partai politik dan tahun 2014 diikuti oleh 12 partai politik. Hal ini membuktikan kembalinya kebebasan politik setelah reformasi.

Diamond (2010) Sejumlah asumsi berdasarkan literatur akademis terhadap isu demokrasi patut dipertanyakan. Pertama, proporsi bahwa masa depan demokrasi berhubungan erat dengan tingkat perkembangan ekonomi. sehingga perkembangan demokrasi akan rendah dinegara miskin. Kedua, sejalan dengan pemikiran pertama bahwa orang-orang miskin tidak terlalu peduli tentang hak-hak politik dan sipil hingga kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Hal ini menjelaskan argumen tentang pengaruh tipe-tipe penguasa terhadap pembangunan ekonomi. Penekanan utama pada tulisan ini adalah mengenai jalan pemikiran yang keliru terhadap pernyataan di atas perlu memandang lebih dalam ciri-ciri suatu penguasa. Hal ini sejalan dengan pernyataan ketiga, apakah pengaruh terhadap demokrasi pada kinerja sistem ekonomi yang ada? Asumsinya bahwa demokrasi harus memberikan kebutuhan-kebutuhan ekonomi jika ingin bertahan.

**Tabel 1.1**  
**Peringkat Demokrasi Indonesia Tahun 2007-2015 Versi *The Economist***

Tahun	Rangking	Total skor	Skor Kategori					Status
			Proses Pemilu Dan pluralisme	Fungsi pemerintahan	Partisipasi Politik	Budaya Politik	Kebebasan sipil	
2015	49	7.03	7.75	7.14	6.67	6.25	7.35	Flawed Democracies
2014	49	6.95	7.33	7.14	6.67	6.25	7.35	Flawed Democracies
2013	54	6.82	6.92	7.50	6.67	6.25	6.76	Flawed Democracies
2012	53	6.76	6.92	7.50	6.11	5.63	7.65	Flawed Democracies
2011	60	6.53	6.92	7.50	5.56	5.63	7.06	Flawed Democracies
2010	60	6.53	6.92	7.00	5.00	5.63	7.06	Flawed Democracies
2008	69	6.34	6.92	6.76	5.00	6.25	6.76	Flawed Democracies
2007	65	6.41	6.92	7.14	5.00	6.25	6.76	Flawed Democracies

*Sumber: Statistik Politik 2016*

Dari tabel peringkat demokrasi versi the economist di atas dapat kita lihat perkembangan demokrasi Indonesia, hal itu dapat kita lihat dari terus meningkatnya rangking demokarsi Indonesia. Dari kategori penilaian demokrasi proses pemilu dan pluralisme, partisipasi politik dan kebebasan sipil terus mengalami peningkatan hal ini didukung karena makin tingginya kesempatan dan kemudahan yang luas kepada masyarakat, para pelaku usaha, aktifis LSM, media untuk turut serta dalam pembangunan.

Semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat ikut mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan politik, baik dalam pemilu dan hal politik lainnya, meningkatnya parisipasi masyarakat dalam politik ini juga didukung semakin tingginya kebebasan masyarakat untuk memilih, dipilih, berkumpul dan berserikat. Hal ini terus menjadikan Indonesia mulai dipandang sebagai negara yg demokratis. Namun dari aspek budaya politik

belum mengalami perkembangan hal ini karena budaya politik dalam masyarakat tidak berkembang. Fakta ini dapat kita lihat di dalam masyarakat Indonesia, dimana mayoritas masyarakat Indonesia menganut budaya politik yang bersifat parokial kaul di satu pihak dan partisipan di pihak lain. Hal lain yang mengganggu budaya politik adalah ikatan primordialisme yang masih kuat, politik balas jasa dan krisis keteladanan di tengah masyarakat.

Sejak tahun 2009 Indonesia telah mengembangkan pengukuran demokrasi berbasis provinsi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang disusun oleh BPS dan Bappenas. Metode penelitian menggunakan pendekatan triangulasi, yang merupakan kombinasi antara pendekatan kuantitatif dengan kualitatif. Pendekatan kuantitatif diperoleh melalui koding koran dan dokumen, sedangkan kualitatif melalui *focus group discussion* (FGD) dan wawancara mendalam. Indeks ini juga menghasilkan angka nasional, yang merupakan rata-rata dari indeks provinsi. Aspek yang diukur dalam IDI di antaranya; kebebasan sipil, hak-hak politik, serta lembaga demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia menyajikan gambaran kondisi demokrasi masing-masing provinsi berdasarkan indikator-indikator yang dikembangkan dari tiga aspek tersebut. Indeks Demokrasi Indonesia menyediakan data penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terkait penilaian terhadap demokrasi.

**Tabel 1.2**  
**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut Provinsi tahun 2009-2016**

Provinsi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Provinsi							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ACEH	66.29	65.36	55.54	54.02	63.56	72.29	67.78	72.48
SUMATERA UTARA	60.20	63.45	66.15	58.51	58.80	68.02	69.01	67.37
SUMATERA BARAT	60.29	63.04	65.02	60.82	54.11	63.99	67.46	54.41
RIAU	75.85	71.45	70.65	67.00	68.37	68.40	65.83	71.89
JAMBI	71.00	65.88	70.46	68.81	64.41	71.15	70.68	68.89
SUMATERA SELATAN	72.52	73.65	67.92	73.17	67.12	74.82	79.81	80.95
BENGKULU	64.76	70.78	71.36	61.70	59.17	71.70	73.60	74.23
LAMPUNG	67.47	67.80	74.08	72.26	63.13	71.62	65.95	61.00
KEP. BANGKA BELITUNG	67.01	65.94	67.13	69.37	68.79	75.32	72.31	83.00
KEP. RIAU	73.61	62.89	70.78	65.61	66.50	68.39	70.26	72.84
DKI JAKARTA	73.91	77.44	77.81	77.72	71.18	84.70	85.32	70.85
JAWA BARAT	71.07	59.41	66.18	57.05	65.18	71.52	73.04	66.82
JAWA TENGAH	66.45	63.42	65.59	63.79	60.84	77.44	69.75	66.71
DI YOGYAKARTA	67.55	74.33	71.67	72.96	72.36	82.71	83.19	85.58
JAWA TIMUR	62.49	55.12	55.98	54.99	59.32	70.36	76.90	72.24
BANTEN	67.98	60.60	67.37	65.29	69.79	75.50	68.46	71.36
BALI	70.35	72.44	74.20	71.75	72.22	76.13	79.83	78.95
NUSA TENGGARA BARAT	58.12	58.13	54.49	57.97	57.22	62.62	65.08	65.41
NUSA TENGGARA TIMUR	71.64	72.05	72.34	72.67	73.29	68.81	78.47	82.49
KALIMANTAN BARAT	72.38	69.32	74.86	65.38	67.52	80.58	76.40	75.28
KALIMANTAN TENGAH	77.63	71.10	76.28	65.78	64.15	79.00	73.46	74.77
KALIMANTAN SELATAN	66.63	70.94	66.47	61.13	63.71	70.84	74.76	73.43
KALIMANTAN TIMUR	72.31	73.04	66.37	71.23	68.13	77.77	81.24	73.64
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	80.16	76.98
SULAWESI UTARA	70.94	65.94	71.19	76.50	73.11	83.94	79.40	76.34
SULAWESI TENGAH	66.02	66.63	64.00	64.97	64.50	74.36	76.67	72.20
SULAWESI SELATAN	61.48	56.67	65.31	68.55	65.20	75.30	67.90	68.53
SULAWESI TENGGARA	64.29	54.79	57.56	57.26	52.61	70.13	69.44	71.13
GORONTALO	73.50	64.97	62.77	59.37	67.21	73.82	76.77	77.48
SULAWESI BARAT	67.99	68.82	66.36	63.65	64.02	76.69	68.25	72.37
MALUKU	69.07	69.51	68.38	59.68	66.23	72.72	65.90	78.20
MALUKU UTARA	67.21	59.92	59.17	66.83	64.06	67.90	61.52	73.27
PAPUA BARAT	63.06	67.75	61.78	65.70	60.70	65.65	59.97	60.35
PAPUA	63.80	60.26	59.05	60.71	60.92	62.15	57.55	61.02
INDONESIA	67.30	63.17	65.48	62.63	63.72	73.04	72.82	70.09

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan IDI di Indonesia dan Provinsi-Provinsi di Indonesia dari tahun 2009-2016. Data IDI Indonesia terus mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2009 IDI Indonesia adalah 67,30 dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya menjadi 63,17 pada tahun 2010, pada tahun 2011 mengalami sedikit peningkatan menjadi 65,48, dan mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2014 menjadi 73,04.

Dari data diatas dapat kita lihat penurunan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2014 hal ini disebabkan karena dipengaruhi penurunan aspek-aspek demokrasi, yaitu aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi. Penurunan aspek kebebasan sipil disebabkan karena meningkatnya hambatan kebebasan berkumpul dan berserikat serta menurunnya kebebasan dari diskriminasi, untuk aspek hak-hak politik karena berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah hal ini menggambarkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kinerja pemerintah, sedangkan aspek lembaga demokrasi disebabkan turunnya kinerja partai politik.

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu indikator yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Semakin besar jurang pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan akan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan.

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia masih menjadi permasalahan utama dan perlu diatasi. Temuan secara empiris dari beberapa peneliti menunjukkan berbagai hasil yang kontroversi terkait masalah pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada satu sisi, ketimpangan distribusi pendapatan dianggap dapat menimbulkan ketegangan sosial dan situasi yang tidak kondusif dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa ukuran ketimpangan yang sering digunakan antara lain : Indeks Gini, Indeks Theil dan ukuran ketimpangan dari Bank Dunia. Dalam penelitian ini ukuran ketimpangan yang digunakan adalah Indeks Gini. Indeks Gini adalah satu ukuran ketimpangan yang paling sering digunakan untuk mengukur ketimpangan dan ukuran ketimpangan agregat yang nilainya berkisar antara nol dan satu. Nilai Indeks Gini nol artinya tidak ada ketimpangan (pemerataan sempurna) sedangkan nilai satu artinya ketimpangan sempurna.

Upah minimum juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataannya upah minimum merupakan komponen penting dalam pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Upah minimum berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu penting untuk tenaga kerja dalam pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran.

Upah minimum ditetapkan oleh pemerintah sebagai perhatian yang penuh pada upah dalam bentuk perlindungan. Berdasarkan ketentuan pasal 88 undang-undang No.13 Tahun 2003, yaitu setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi hal tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan yang melindungi pekerja/buruh. Salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap upah adalah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam menetapkan upah minimum pemerintah melihat kebutuhan hidup minimum, kemampuan untuk tumbuh dan keberlangsungan perusahaan, kondisi pasar kerja, indeks harga konsumen, tingkat upah minimum antar daerah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita daerah tersebut. Dengan melihat itu semua maka pemerintah akan mengkaji dan menetapkan seberapa besar upah minimum di tiap-tiap daerah, ini berlaku juga ketika pemerintah hendak menaikkan upah minimum disuatu daerah tertentu. Karena apabila pemerintah tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas maka bisa mengakibatkan roda perekonomian di daerah tersebut bisa terganggu dan terhambat atau bisa timbul ketidakseimbangan perekonomian, ini dikarenakan kenaikan upah minimum yang tidak tepat akan mempengaruhi tingkat produksi, konsumsi dan distribusi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka ada beberapa rumusan masalah yang dapat diambil sebagai kajian teori.

1. Sejahterama pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
2. Sejahterama pengaruh Indeks Gini terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
3. Sejahterama pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
4. Sejahterama pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa.

1. Pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2. Pengaruh Indeks Gini terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3. Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
4. Pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Gini, Upah Minimum Provinsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Berguna bagi pengembangan Ilmu Ekonomi, terutama Ilmu Ekonomi Publik.

2. Berguna bagi pengambil kebijakan Kemenkumham.
3. Bagi peneliti lebih lanjut tentang pengaruh Ketidakstabilan Politik terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
4. Bagi mahasiswa sebagai bahan Skripsi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pertumbuhan Ekonomi**

###### **1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Sukirno (2006), pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu. Sehingga, pertumbuhan ekonomi menggambarkan sampai dimana perubahan perekonomian pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sedangkan menurut beberapa ahli ekonomi dalam Case and Fair (2004:323) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan keluaran total suatu perekonomian.

Menurut Dornbusch (2008: 11) Tingkat pertumbuhan dari perekonomian adalah tingkat dimana produk domestik bruto (PDB) meningkat. Secara rata-rata, kebanyakan perekonomian tumbuh beberapa poin persentase per tahun selama beberapa periode yang panjang. Adapun penyebab pertumbuhan PDB adalah tersedianya jumlah sumber daya sejalan perubahan perekonomian yaitu berupa modal dan tenaga kerja yang merupakan faktor produksi, sehingga kenaikan faktor produksi diperhitungkan menjadi kenaikan dalam PDB.

Selanjutnya penyebab kenaikan PDB adalah perubahan efisiensi penggunaan faktor produksi. Peningkatan efisiensi disebut peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas ini terjadi akibat perubahan dalam teknologi. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa peningkatan produktivitas melalui perubahan teknologi akan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik yaitu berupa peningkatan output yang lebih besar.

Produk domestik bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu (Mankiw, 2007: 12). PDB sendiri merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam melihat aktivitas ekonomi. PDB terbagi dua yaitu PDB nominal dan PDB Riil. PDB nominal adalah nilai barang dan jasa yang diukur dengan harga berlaku. Sedangkan PDB riil adalah nilai barang dan jasa yang diukur dengan menggunakan harga konstan. Sehingga jika ingin melihat kondisi perekonomian suatu negara saat ini bisa dilihat melalui PDB nominal. Sedangkan jika ingin melihat pertumbuhan ekonomi maka akan dilihat melalui PDB riil karena bisa melihat kenaikan suatu output di suatu negara berdasarkan harga tahun tertentu (Mankiw, 2007 : 23).

Perhitungan PDB adalah dengan memasukkan nilai barang dan jasa akhir (*final goods and services*) yang diproduksi. Penekanan pada barang dan jasa akhir ini dilakukan agar tidak terjadi perhitungan ganda dalam PDB (Dornbusch, 2008: 36). Produk Domestik Bruto dapat dihitung

dengan memakai tiga pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran, pendekatan produksi, dan pendekatan pendapatan. Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah dengan menjumlahkan biaya konsumsi, investasi pengeluaran pemerintah dan ekspor bersih. Sedangkan dengan cara produksi pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian.

Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi antara lain biaya sewa, upah bunga dan laba. Dimana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha. PDB dengan pendekatan pengeluaran, pendekatan produksi dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.

Sehingga dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output yang dihasilkan oleh suatu negara. Peningkatan ini bisa dilihat melalui indikator pertumbuhan ekonomi yaitu produk domestik bruto (PDB) dengan melihat PDB riil-nya karena mencerminkan perubahan output yang dihasilkan dari satu periode ke periode berikutnya.

## 1.2 Teori Rostow dan Teori Harrod-Domar

Teori Rostow menjelaskan bahwa ada tahap-tahap yang dilewati suatu negara dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan memperkuat tabungan nasional. Teori ini diperjelas lagi dengan teori Harrod-Domar yang menyebutkan bahwa semakin banyak porsi PDB yang ditabung akan menambah *capital stock* sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kedua teori tersebut menjelaskan bahwa tingkat tabungan dan *capital stock* yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun beberapa studi empiris menunjukkan hasil yang berbeda antara negara-negara di Eropa Timur dan di Afrika. Hal ini menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti kualitas SDM dan infrastruktur pendukung (Todaro : 2006).

## 1.3 Teori Pertumbuhan Endogen

Teori-teori selanjutnya adalah teori pengembangan model Solow. Diantaranya teori pertumbuhan endogen yang berusaha menjelaskan bahwa sumber-sumber pertumbuhan adalah peningkatan akumulasi modal dalam arti yang luas. Modal dalam hal ini tidak hanya dalam sifat fisik tetapi juga yang bersifat non-fisik berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi ini akan mengembangkan inovasi sehingga meningkatkan produktivitas dan berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Adanya penemuan-penemuan baru berawal dari proses *learning by doing*, yang dapat memunculkan penemuan-penemuan baru yang meningkatkan efisiensi produksi. Efisiensi ini yang dapat meningkatkan produktivitas. Sehingga dalam hal ini kualitas sumber daya manusia adalah faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **2. Dampak demokrasi pada pertumbuhan ekonomi**

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Sistem ini menjadi pilihan paling populer yang digunakan negara-negara di dunia. Sekalipun demikian, pada prakteknya negara-negara yang mengaku demokratis tidak otomatis melakukan pengelolaan negara dan kekuasaan dengan norma-norma demokrasi (Statistik Politik : 2016).

Demokrasi memiliki efek menguntungkan baik politik dan ekonomi. lembaga-lembaga demokrasi memiliki peran untuk mengontrol kekuasaan pemerintah dan membatasi perilaku pemerintah atau dimaksudkan untuk memperkenalkan kebijakan tidak populer. Diantara manfaat demokrasi adalah bahwa hal itu memungkinkan pengusiran pemimpin yang buruk.

Hasil penelitian empiris tentang demokrasi terbagi menjadi tiga. Sekitar sepertiga penelitian menemukan dampak positif demokrasi terhadap pertumbuhan, sepertiga yang lainnya menemukan bahwa demokrasi tidak berdampak apa-apa, dan sepertiga sisanya menemukan bahwa demokrasi berdampak negatif terhadap pertumbuhan. Baru-baru ini Ahmed Mobarak

berpendapat bahwa rezim demokratik akan lebih stabil daripada rezim autokrasi. Hasilnya, karena perekonomian yang lebih tidak stabil diketahui tumbuh lebih lambat daripada perekonomian yang stabil, efek positif demokrasi pada pertumbuhan dapat terlaksana melalui saluran ini. Namun, manfaat yang diperoleh dapat dinegosiasikan oleh efek negatif demokrasi pada pertumbuhan (Todaro: 2006).

Utara (dalam Zaouali, 2014) berpendapat bahwa elit otoriter menyerang kurang dibatasi oleh lembaga-lembaga masyarakat demokratis. Bueno de Mesquita dan al. (2001) mendukung gagasan bahwa para pemimpin otoriter memiliki beberapa pemeriksaan pada kekuasaan mereka dan karena itu terlibat dalam kronisme dan korupsi.

Lipset (dalam Zaouali, 2014) berpendapat bahwa ada hubungan yang erat antara kekayaan dan demokrasi. Dia menyarankan bahwa demokrasi adalah lebih mungkin terjadi dalam masyarakat industri di mana kekayaan yang dihasilkan oleh sejumlah besar produsen industri. Kelas menengah mempertahankan partisipasi yang kuat dalam sistem yang menyediakan kebebasan pilihan politik dan ekonomi yang cukup untuk memungkinkan penciptaan kekayaan lebih.

Menurut Sirowy dan Inkeles (dalam Zaouali, 2014), perluasan dan perlindungan kebebasan fundamental dianggap menghasilkan harapan keamanan yang diperlukan untuk memotivasi orang untuk bekerja, untuk menyimpan dan berinvestasi. Selain itu, partisipasi politik populer tidak hanya mengakibatkan melanggar kepentingan dan hak-hak beberapa, tetapi juga melibatkan mentalitas

partisipatif yang sangat meningkatkan arus informasi yang sangat penting bagi pemerintahan yang efektif dan efisien. pluralisme politik bertindak untuk membebaskan energi dan kondisi penerimaan yang baik untuk mengubah dan untuk pembangunan ekonomi.

Clague, Keefer dan Knack (dalam Zaouali, 2014), menunjukkan bahwa demokrasi memberikan keselamatan dan keamanan yang lebih besar untuk melaksanakan hak milik dari rezim otoriter. Tapi manfaat demokrasi tidak muncul dalam jangka pendek. hak milik lemah ketika demokrasi mengalami durasi pendek: demokrasi panjang (berakar) menghasilkan jaminan yang lebih baik untuk pelaksanaan hak milik.

Menurut Rodrik (dalam Zaouali, 2014), lembaga-lembaga demokratis, pengadilan yang independen dan efektif, dan birokrasi non-korup yang baik adalah lembaga untuk mengelola sosial distribusi konflik. Rodrik (dalam Zaouali, 2014) telah memberikan bukti empiris bahwa:

- a) Demokrasi mengurangi volatilitas dan mengarah ke tingkat yang lebih tinggi dari pertumbuhan dalam jangka panjang.
- b) Demokrasi menghasilkan stabilitas yang lebih baik dalam jangka pendek yang berarti bahwa terlepas dari tingkat pertumbuhan jangka panjang ekonomi, ada sedikit volatilitas dalam kinerja ekonomi di bawah demokrasi dari rezim otoriter.

- c) Demokrasi memungkinkan ekonomi untuk menghadapi guncangan yang merugikan: menunjukkan bahwa partisipasi politik meningkatkan kemampuan ekonomi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal.
- d) Demokrasi memungkinkan distribusi yang lebih baik.

### **2.1 Indeks Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)**

Kebebasan merupakan kondisi yang sangat penting bagi demokrasi karena tanpa kebebasan maka masyarakat tak dapat menuntut akuntabilitas pemerintah. Namun, kebebasan mempunyai berbagai makna. Menurut Isaiah Berlin (dalam Rauh, 2012) kebebasan dapat didefinisikan secara negatif maupun positif. Secara negatif (*negative freedom*) adalah kebebasan dari interference (ancaman, gangguan, pembatasan, dsb) dari luar. Dalam bahasa sehari-hari, *negative freedom* ini dapat diekspresikan sebagai “*freedom from*” atau “kebebasan dari”. Sementara itu kebebasan positif (*positive freedom*) adalah kebebasan untuk mengaktualisasikan atau merealisasikan potensi yang dikaitkan dengan jaminan-jaminan pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Kebebasan positif ini dalam bahasa sehari-hari secara baik diekspresikan sebagai “*freedom to*” atau “kebebasan untuk”.

Ancaman bagi kebebasan sipil umumnya berasal dari dua sumber utama. Pertama, ancaman yang bersumber dari para pemegang otoritas

negara, atau dikenal dengan sebutan *supreme coercive authority*. Pemerintah pada umumnya kurang menyukai adanya kebebasan sipil, terutama dalam hal mengemukakan pendapat dan berserikat, karena akan mengganggu hegemoni politik yang dimiliki. Ancaman yang kedua, berasal dari apa yang John Stuart Mill sebut sebagai “*tyranny of the majority*”. Ancaman yang disebut terakhir ini, bisa saja tidak berasal dari negara, dan/atau pemerintah, tetapi bersumber dari sesama masyarakat sipil Bealey (dalam Rauh, 2012)

Namun demikian, pada konteks IDI, kebebasan sipil yang akan dilihat dibatasi hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu. Atau dengan kata lain, IDI tidak melihat kebebasan individu/warganegara dari individu/warganegara lainnya. Alasan yang mendasarinya antara lain karena (a) aspek isu strategis yang sering muncul di negara-negara di seluruh dunia terkait dengan kebebasan sipil adalah persoalan kebebasan dari intervensi negara dan atau kelompok masyarakat lainnya, khususnya bagi negara yang relatif belia menerapkan demokrasi; (b) secara metodologis, pengumpulan data untuk mengukur kebebasan individu dari individu lainnya, sulit untuk dilakukan.

## **2.2 Indeks Hak-Hak Politik (*Political Rights*)**

Mengingat pentingnya aspek hak politik (*political rights*) ini, Robert Dahl (dalam Rauh, 2012) memberikan lima indikator untuk dimensi hak

politik yakni: hak untuk memberikan suara, hak untuk memperebutkan jabatan publik, hak berkompetisi dalam merebut suara, pemilihan yang bebas dan adil, dan pembuatan kebijakan pemerintah berdasarkan suara atau pilihan publik. Dalam konteks IDI, hak-hak politik diturunkan ke dalam dua variabel yakni:

1) Hak Memilih dan Dipilih

Hak setiap individu untuk secara bebas memberikan suara dalam pemilihan pejabat publik. Sedangkan hak dipilih adalah hak setiap individu untuk berkompetisi memperebutkan suara secara bebas dalam suatu pemilihan sebagai pejabat publik.

2) Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Secara harfiah partisipasi berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Salah satu bentuk partisipasi politik adalah menggunakan hak pilih dalam pemilu. Bentuk lain dari partisipasi adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan maupun pengawasan keputusan. Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari jumlah (frekuensi) keterlibatan baik secara individual maupun kelompok dalam berbagai kegiatan seperti *hearing*, demonstrasi, mogok, dan semacamnya. Sementara pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan

dalam bentuk pelaporan/pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui *press statement*, pengaduan kepada kepolisian, dan prakarsa media memuat berita terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

### **2.3 Indeks Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*)**

Seperti dikemukakan pada ulasan sebelumnya, bahwa *civil liberties* dan *political rights* sebagai pilar dari konsep demokrasi tidak mungkin akan dapat teraktualisasikan secara maksimal tanpa didukung oleh lembaga-lembaga demokrasi. Atas dasar pertimbangan ini, cukup beralasan bila beberapa akademisi telah mengartikulasi lembaga demokrasi sebagai aspek yang tidak terpisahkan dari *civil liberties* dan *political rights*. Mengingat begitu krusialnya peran dari lembaga demokrasi tersebut, maka bagi mereka yang berafiliasi dengan perspektif ini, acapkali mengatakan bahwa satu di antara yang membedakan antara "demokrasi" dan "anarkhi" adalah, karena kebebasan sipil dalam praktik demokrasi dilakukan secara institusional, atau dengan kata lain di dasarkan pada aturan, norma, prosedur dan kelembagaan yang telah disepakati secara bersama. Kendati kata "lembaga" atau "institusi" itu sendiri sering memiliki arti yang berbeda antara disiplin ilmu satu dengan lainnya, namun pada konteks ilmu politik, institusi telah didefinisikan sebagai lembaga publik yang dibentuk dan difungsikan untuk mengatur

dan melaksanakan aktivitas negara, dan/ atau pemerintah Bealye, (dalam Rauh, 2012).

Pandangan bahwa tindakan stabilitas adalah masalah teknis belaka merupakan pandangan yang memang sesuai dengan agenda dari pendekatan klasik yaitu depolitisasi terhadap masyarakat. Bahkan dalam kondisi dimana intervensi dari lembaga politik dirasa perlu, aspek politik masih tetap bisa dikurangi sedapat mungkin dari dalam intervensi itu (caporaso, 2008: 294).

### **3. Ketimpangan Pendapatan**

Pemerataan penghasilan dikatakan timpang apabila individu yang kaya dapat dapat mendikte seluruh pola produksi, karena permintaannya lebih banyak membawa bobot dalam pasar barang-barang konsumsi dibandingkan orang-orang yang miskin (Todaro,2004:225).

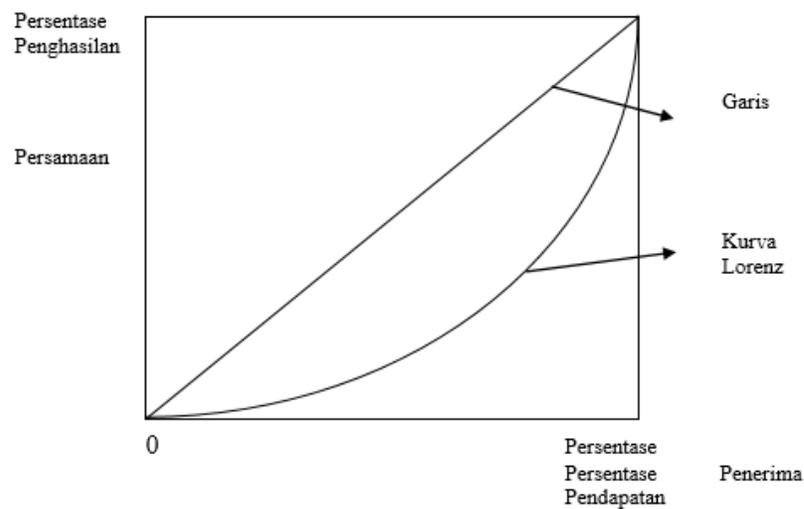
Sedangkan menurut Myrdal bahwa ketimpangan pendapatan terjadi karena kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-negara berkembang (Jhingan,2012:212). Adapun defenisi lain mengenai ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang di hasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat (Todaro,2004:223).

Sehingga dapat di simpulkan bahwa ketimpangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengabaikan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat tersebut. Akibatnya yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Indikator untuk mengetahui ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui:

a) *Kurva Lorenz*.

Cara yang digunakan untuk melihat ketimpangan adalah melalui kurva lorenz pada gambar 1 dimana jumlah penerimaan penghasilan ditempatkan di atas sumbu horizontal sedangkan sumbu vertikal menggambarkan bagian jumlah penghasilan yang di terima oleh masing-masing populasi. Kedua sumbu tersebut dikumulatifkan sampai dengan 100 persen dengan demikian kedua sumbu tersebut sama panjangnya .



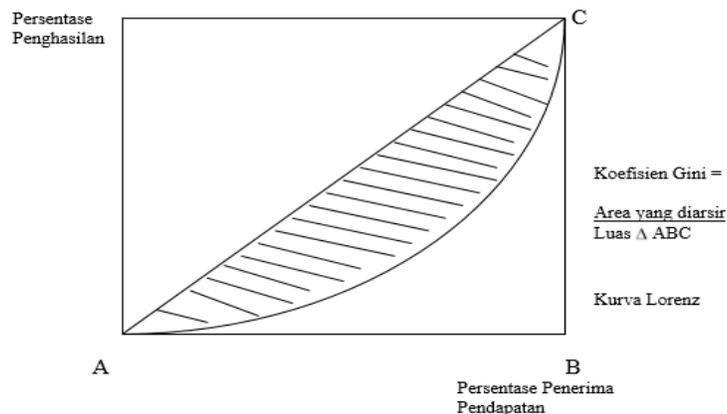
**Gambar 2.1 Kurva Lorenz**  
**Sumber : Todaro (2004:225)**

Kurva lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif yang aktual antara persentase penerimaan penghasilan yang mereka terima sebelumnya. Semakin jauh Kurva Lorenz dari garis diagonal berarti

semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi, dan sebaliknya semakin dekat Kurva Lorenz dengan garis diagonal semakin kecil tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi.

*b) Koefisien Gini*

Ukuran terakhir yang sangat sederhana dan ringkas mengenai tingkat relatif ketimpangan pendapatan di sebuah negara dapat di peroleh dengan menghitung rasio dari bidang yang berada di antara bidang diagonal dan kurva lorenz kemudian dibagi dengan total bidang setengah bujur sangkar tempat kurva itu terletak.



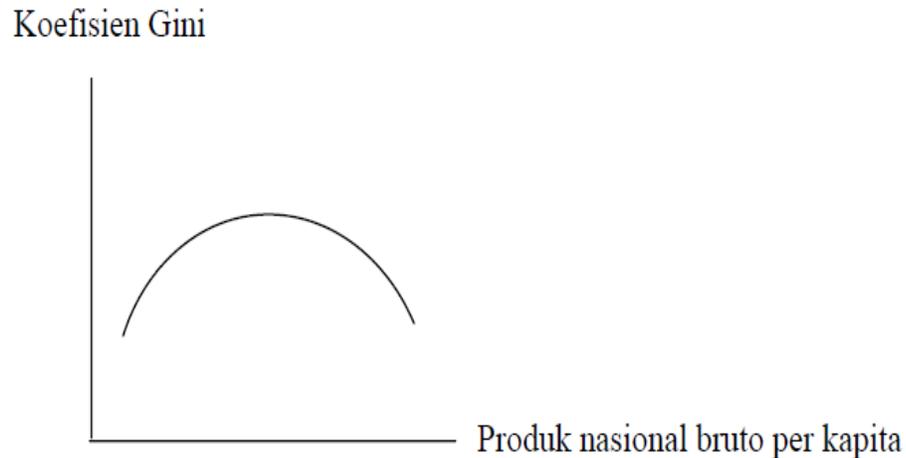
**Gambar 2.2 Koefisien Gini**  
**Sumber : Todaro (2004:226)**

Koefisien gini adalah ukuran ketimpangan agregat dan bisa memiliki beberapapun, berkisar dari 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (Ketimpangan sempurna). Koefisien gini bagi negara-negaraa yang distribusi pendapatannya sangat timpang berada di antara 0,50 dan 0,70, sedangkan bagi negara-negara yang distribusi pendapatannya

relatif merata memiliki koefisien gini antara 0,20 dan 0,35 (Todaro:2004:226).

Deliarnov (2006: 77) pengikut aliran strukturalis berusaha mengungkapka sekaligus mengusut ketimpangan-ketimpangan struktural yang diakibatkan pemusatan penguasaan dan kepemilikan aset ekonomi serta ketimpangan distribusi pendapatan, produksi, dan kesempatan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan menjelajahi komposisi dan interrelationship di antara aktor-aktor, sektor-sektor dan variabel-variabel ekonomi demi mewujudkan keadilan dan kesempatan sosial-ekonomi.

Todaro (2004) Kuznets mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznets “U-terbalik”, karena perubahan longitudinal (*time-series*) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern. Koefisien Gini tampak seperti kurva berbentuk “UTerbalik”, seiring dengan naiknya PDRB.



**Gambar 2.3 Kurva Kuznets “U-Terbalik”**  
**Sumber : Todaro (2004)**

Todaro (2004) Kurva kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern, seiring dengan perkembangan sebuah negara dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern. Beberapa ekonom pembangunan tetap berpendapat bahwa tahapan peningkatan dan kemudian penurunan ketimpangan pendapatan yang dikemukakan kuznets tidak dapat dihindari. Sekarang sudah banyak studi kasus dan contoh-contoh spesifik dari berbagai negara seperti taiwan, korea selatan, kosta rika, dan sri lanka yang menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan nasional dapat dibarengi dengan penurunan ketimpangan pendapatan atau pemerataan.

Penelitian Forbes dan Frank, Cingano (2014) membuktikan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Temuan penelitian Ali (2014) di Pakistan juga memperbanyak bukti empiris mengenai

hubungan negatif antara kedua variabel tersebut. Sebelumnya Qin. (2009) menyimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan berdampak negatif terhadap GDP dan pertumbuhan ekonomi sektoral. Amri (2017)

Lahouij (2017) negara-negara yang memiliki tingkat ketimpangan pendapatan paling tinggi kebanyakan adalah negara-negara berkembang dan terbelakang. Selain itu, telah diperdebatkan bahwa kesetaraan pendapatan di negara berkembang mengarah pada pertumbuhan yang berkelanjutan

#### **4. Upah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Upah merupakan imbalan jasa yang diterima seseorang didalam hubungan kerja yang berupa uang atau barang, melalui perjanjian kerja, imbalan jasa dan diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri dan keluarga. Dalam pengertian teori ekonomi, upah yaitu pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha, sadono sukini(2002).

Sulistiawati (2012), yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat diharapkan akan terwujud apabila pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak pada tingkat upah yang layak.

Sudarsono (1988) yang menyatakan bahwa permintaan akan tenaga kerja di pengaruhi oleh tingkat upah dan faktor lain adalah permintaan akan barang-barang hasil produksi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat

upah pada tenaga kerja maka akan memicu tingkat konsumsi masyarakat di mana hal ini akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.(Julianto 2016)

Fanti (2010) berpendapat Mengenai model (upah minimum di negara terbuka) kontribusi penting adalah Askenazy (2003), yang menganalisis efek dari upah minimum pada pertumbuhan dalam model perekonomian terbuka tetapi dengan asumsi, model pertumbuhan endogen kontinu di mana upah minimum menyebabkan pergeseran upaya dari sektor produksi ke sektor R & D dan dengan demikian dapat merangsang pertumbuhan melalui saluran ini.

Sedangkan Sabia (2015) berpendapat Teori ekonomi menunjukkan bahwa efek makroekonomi dari kenaikan upah minimum pada produk domestik bruto (PDB) adalah ambigu. Kenaikan upah minimum dapat meningkatkan biaya tenaga kerja dan harga output, mengurangi keuntungan perusahaan dan pelatihan kerja, dan menyebabkan kerugian, yang masing-masing dapat mengurangi PDB. Namun, jika kenaikan upah minimum menaikkan pendapatan pekerja berketerampilan rendah yang mempertahankan pekerjaan dan pekerja ini memiliki kecenderungan marginal lebih tinggi untuk mengkonsumsi penghasilan dolar tambahan dari pemilik yang kenaikan upah minimum pekerjaan ini akan menghasilkan PDB yang lebih tinggi

## **B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Alesina & Rodrik (1994) dalam penelitiannya yang berjudul "*Distributive Politics and Economic Growth*" dalam penelitiannya dapat diketahui bahwa ketidakmerataan pendapatan dan kepemilikan lahan akan berpengaruh negatif

pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat, sedangkan demokrasi, indeks gini ketimpangan pendapatan dan indeks gini ketimpangan kepemilikan lahan sebagai variabel bebas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya sama-sama menggunakan demokrasi dan indeks gini ketimpangan pendapatan, namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada data, variabel Upah Minimum Provinsi dan tempat penelitian yang berbeda.

Ra\_ Amir-ud-Din (2008) dalam jurnalnya yang berjudul *Democracy, Inequality and Economic Development: The Case of Pakistan* dalam penelitian ini terbukti bahwa tidak ada dampak signifikan demokrasi pada variabel kebijakan fiskal seperti pengeluaran, pendapatan dan defisit. Demikian pula, tidak ada hubungan antara demokrasi dan pengeluaran sosial (hubungan antara demokrasi dan berbagai komponen dan masyarakat, sosial dan pelayanan publik telah terbukti tidak signifikan dalam model acuan ini). Salah satu dari banyak kemungkinan alasan untuk hubungan yang tidak signifikan ini bahwa lembaga-lembaga demokrasi tidak diberi kesempatan untuk mengambil perusahaan di Pakistan sejak kemerdekaan, yang hasilnya adalah bahwa demokrasi melihat politisi berjuang sendiri daripada membuat upaya tulus dan terpadu yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan pertumbuhan.

Sandalcilar (2013) dalam penelitian berjudul *Democracy and growth: Evidence from Transition Economies*. *American International Journal of Contemporary Research* yang pada penelitiannya yang menggunakan analisis

Polity IV Democracy Index, dimana hubungan yang signifikan antara demokrasi dan pertumbuhan tidak terdeteksi. pengkodean berdasarkan pada indeks yang digunakan menyetujui validitas situasi ini. Artinya, demokrasi politik tidak memiliki efek langsung pada pertumbuhan ekonomi transisi, efek positif pada faktor-faktor penentu demokrasi ekonomi dapat dilihat sebagai efek positif pada pertumbuhan. pengaruh tidak langsung dari demokrasi politik pada transisi berkelanjutan untuk ekonomi pasar di negara-negara tersebut tidak bisa dipungkiri.

zaouali (2014) dalam penelitiannya yang berjudul *“Corruption's and Democracy's effects on Economic Growth”* dalam penelitiannya Ekonom memiliki pendapat bahwa proses politik seperti demokrasi dan korupsi penting bagi pertumbuhan ekonomi. dalam makalah ini adalah untuk menunjukkan bahwa salah satu efek positive tidak langsung demokrasi adalah kemampuannya untuk mengurangi efek negatif dari korupsi pada pertumbuhan ekonomi. Meskipun sebagian besar negara-negara demokratis dalam sampel kami memiliki tingkat korupsi yang tinggi, mekanisme pemilihan menghambat pemimpin terlibat dalam tindakan korupsi yang menyebabkan kerusakan kinerja ekonomi dan dengan demikian membahayakan kelangsungan hidup politik mereka. Memanfaatkan pendekatan data panel dinamis untuk lebih dari 40 negara selama periode 2000- 2011, hasil menunjukkan bahwa di negara-negara demokrasi, korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara negara-negara non-demokratis menderita efek negatif dari korupsi yang

menghambat pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat sedangkan demokrasi dan korupsi sebagai variabel bebas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya ada pada variabel korupsi yang tidak ada pada penelitian saya, penggunaan data dan tempat penelitian juga berbeda.

Julianto (2016) dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Industri Besar Dan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Surabaya yang menyebutkan dari uji yang dilakukan variabel bebas Upah Minimum memiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kota Surabaya. Dari penelitian ini juga diketahui upah minimum mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kota Surabaya. Maka apabila Upah Minimum meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

Amri (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Panel Data 8 Provinsi di Sumatera. Jurnal Ekonomidan Manajemen Teknologi. yang menyebutkan ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebaliknya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi selain dipengaruhi oleh dirinya sendiri juga dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan. sebaliknya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Lahouij (2017) dalam penelitiannya yang berjudul *The Effects of Income inequality on Economic Growth Evidence from MENA Countries*. Eastern Illinois University The Keep Penelitian ini Melihat dampak ketimpangan pendapatan dan faktor penentu pertumbuhan ekonomi lainnya pada pertumbuhan ekonomi beberapa negara pengimpor minyak yang dipilih menggunakan data panel untuk rentang waktu 1980-2007. Makalah ini memberikan kontribusi untuk literatur tentang ketimpangan pendapatan, indikator pembangunan ekonomi, dan pembangunan ekonomi dengan cara-cara baru. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan melambatkan laju perubahan pembangunan ekonomi.

### **C. Kerangka Konseptual**

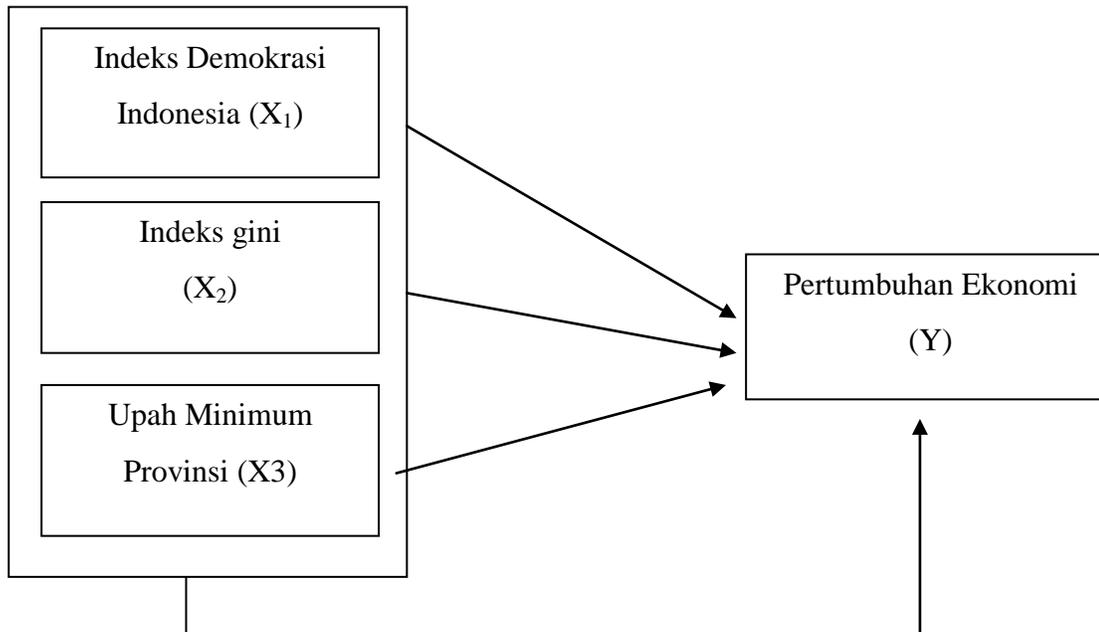
Kerangka konseptual merupakan bagian untuk menunjukkan kerangka berfikir dengan tujuan menjelaskan keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan rumusan masalah yang berlandaskan kajian teori diatas. Keterkaitan variabel yang diteliti adanya pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia ( $X_1$ ), Indeks Gini ( $X_2$ ) dan Upah Minimum Provinsi ( $X_3$ ), terhadap Pertumbuhan Ekonomi ( $Y$ ).

Demokrasi memiliki efek menguntungkan baik politik dan ekonomi. Lembaga-lembaga demokrasi memiliki peran untuk mengontrol kekuasaan pemerintah dan membatasi kebijakan yang tidak populer. Diantara manfaat demokrasi adalah memungkinkan mengurangi kepemimpinan yang kurang baik. Demokrasi memungkinkan ekonomi untuk menghadapi guncangan yang merugikan, menunjukkan bahwa partisipasi politik meningkatkan kemampuan

ekonomi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal. Demokrasi yang baik akan menjadikan agen ekonomi tidak lagi berkuat melawan sistem demokrasi yang buruk dan bisa lebih berfokus terhadap aktivitas ekonomi, sehingga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Indeks gini merupakan ukuran ketimpangan agregat, Indeks gini berkisar dari 0 sampai 1. Angka yang mendekati 0 menandakan tingkat ketimpangan yang rendah dan angka yang mendekati 1 menandakan ketimpangan yang tinggi. Koefisien gini digunakan oleh banyak negara untuk melihat ketimpangan di negara tersebut. Pada awalnya di negara miskin pertumbuhan ekonomi menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan, namun bila negara miskin telah menjadi negara maju maka persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan akan menurun. Pemerataan yang lebih adil di negara berkembang merupakan syarat menunjang pertumbuhan ekonomi. Sehingga semakin rendah ketimpangan akan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Upah Minimum Provinsi merupakan upah yang paling rendah yang diizinkan untuk dibayar oleh perusahaan kepada para pekerja di provinsi tersebut. Pada awalnya diharapkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan meningkatkan tingkat upah yang layak bagi tenaga kerja guna meningkatkan taraf hidup, peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dilihat dari makin tingginya daya beli masyarakat dipasaran sehingga dengan meningkatnya daya beli membuat meningkatnya pertumbuhan ekonomi.



**Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Pengaruh Ketidakstabilan Politik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis merupakan dugaan awal yang masih bersifat sementara dan baru bisa dibuktikan kebenarannya setelah sebuah data empiris diperoleh. Dalam penelitian dapat dirumuskan hipotesis guna memberikan pedoman maupun arah dalam melakukan penelitian. Hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. Indeks Demokrasi Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Indeks Gini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$$H_a : \text{salah satu koefisien} \neq 0$$

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis Regresi Panel yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 5 tahun periode penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Indeks Demokrasi Indonesia tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 33 Provinsi di Indonesia. Hal ini berarti Indeks Demokrasi Indonesia tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 33 Provinsi di Indonesia.
2. Indeks Gini berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 33 Provinsi di Indonesia. Hal ini berarti semakin rendah Indeks Gini maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 33 Provinsi di Indonesia.
3. Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 33 Provinsi di Indonesia. Hal ini berarti semakin tinggi Upah Minimum Provinsi maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 33 Provinsi di Indonesia.
4. Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi secara bersamaan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 33 Provinsi di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya serta dari hasil penelitian ini dan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah harus berupaya maksimal melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan terutama berkaitan dengan penyelewengan anggaran baik dalam pembahasan oleh lembaga DPR, maupun pada tahap pelaksanaan. Sehingga pemerintah diharapkan mampu memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat agar tidak terpengaruh dengan politik uang dan lebih berfokus terhadap program pembangunan. Sedangkan untuk lembaga-lembaga negara diharapkan pemerintah benar-benar mampu membersihkannya dari korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) sehingga dapat merumuskan kebijakan yang baik, sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi.
2. Pemerintah daerah dinilai perlu mengambil kebijakan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara memperluas lapangan kerja, penyediaan infrastruktur ekonomi yang lebih baik serta meningkatkan investasi. Namun demikian, upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan upaya pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat, sehingga ketimpangan pendapatan dapat diperkecil.

3. Dewan Pengupahan Provinsi dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku yang berwenang dalam penetapan upah minimum agar lebih bijak dalam menetapkan tingkat upah minimum dengan melihat tingkat kebutuhan hidup layak (KHL), pendapatan perkapita daerah, kondisi pasar kerja, serta produktivitas tenaga kerja. Dengan begitu roda perekonomian tidak terganggu dan seimbang, sehingga perekonomian di Provinsi-Provinsi di Indonesia tetap meningkat dengan baik.
4. Disarankan untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan acuan penulis dalam melakukan penelitian mengenai Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga dapat memberikan masukan yang lebih lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alesina, D.Rodrik. 1994. *Distributive Politics and Economic Growth*. *Digital Access to Scholarship at Harvard*.
- Alhumami, Amich. 2010. Demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Okezone.com <https://economy.okezone.com/read/2010/10/08/279/380384/demokrasi-dan-pertumbuhan-ekonomi>
- Aisen, Jose Vega. 2010. *How does Political instability affect economic growth?*. *European Journal of Political Economy*.
- Amri, Khairul. 2017. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Panel Data 8 Provinsi di Sumatera. *Jurnal Ekonomidan Manajemen Teknologi*.  
Bank Indonesia, 2017.
- Bank Pusat Statistik Indonesia.
- Caporaso, James A, David P.Levine. 2008. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Edisi 1, Pustaka Pelajar.Yogyakarta.
- Case, Karl E dan Ray C.Fair. 2004. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*, PT.INDEKS: Jakarta.
- Charysa, Ninda Noviani. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah 2008-2011. *Economics Development AnalySys Journal*.
- Deliarinov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Diamond, Larry. 2010. *Pembangunan Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi- Hubungan dan Pengaruhnya*.
- Dornbush, Fischer. 2008. *Makroekonomi*. Edisi kesepuluh. PT. Media Global Edukasi.
- Fanti, Luciano and Luca Gori. 2010. *On economic growth and minimum wages*. *Munich Personal RePEc Archive*.
- Gujarati. 2006. *Basic Econometrics*. Fourth Edition. The Mcgraw-Hill Companies.
- Jhingan,M.L.2012. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Edisi 1, Pt.Raja Grafindo Persada.Jakarta.